

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Triple Bottom Line*

2.1.1.1 Pengertian *Triple Bottom Line*

Planet, People, and Profit atau dalam ilmu akuntansi lazim disebut dengan *Triple Bottom Line* merupakan pemikiran yang sudah berkembang cukup lama di Eropa. Pemikiran tentang bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business*) yang mengedepankan kelestarian alam (*planet*) sebagai sumber dari semua sumber daya, kesejahteraan masyarakat atau manusia (*people*), dan memperoleh laba (*profit*) yang memadai untuk kelangsungan hidup perusahaan. John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*” menjelaskan konsep *Triple Bottom Line* yang digunakan sebagai landasan prinsipal dalam aplikasi program *Corporate Social Responsibility* dan *Sustainability Report* pada sebuah perusahaan. Tiga kepentingan yang menjadi satu ini merupakan garis besar dan tujuan utama tanggung jawab sosial sebuah perusahaan.

Profit (Keuntungan). Keuntungan merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Keuntungan sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

People (Masyarakat). Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu, operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada keputusan perusahaan tersebut tidak bersifat paksaan atau tuntutan masyarakat sekitar. Untuk memperkokoh komitmen dalam tanggung jawab sosial diperlukan pandangan mengenai *Corporate Social Responsibility*. Melalui kegiatan sosial perusahaan maka itu dapat dikatakan melakukan investasi masa depan dan timbal baliknya masyarakat juga akan ikut serta menjaga eksistensi perusahaan.

Planet (Lingkungan). Lingkungan merupakan sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan perusahaan. Hubungan perusahaan dan lingkungan adalah hubungan sebab akibat yaitu jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan bermanfaat bagi perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan merusak lingkungan maka lingkungan juga akan tidak memberikan manfaat kepada perusahaan. Dengan demikian, penerapan konsep *Triple Bottom Line* yakni *profit*, *people*, dan *planet* sangat diperlukan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan saja melainkan juga memperdulikan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Menurut GRI (2006), pelaporan keberlanjutan dapat menjadi platform untuk menyampaikan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola

organisasi, yang menunjukkan dampak positif dan negatif. Aspek yang dianggap penting oleh organisasi, terkait dengan harapan dan kepentingan para pemangku kepentingan, mendukung pelaporan keberlanjutan. Pemangku kepentingan dapat mencakup mereka yang berinvestasi pada organisasi serta mereka yang memiliki hubungan lain dengan organisasi. Pelaporan keberlanjutan membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan dalam rangka membuat operasi mereka lebih berkelanjutan.

Dari pengertian dan pemaparan di atas penulis memiliki pemahaman bahwa *Triple Bottom Line* merupakan landasan dalam mengaplikasikan program *Corporate Social Responsibility* dan *Sustainability Report* dimana perusahaan melaporkan aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam penelitian ini penulis mengambil *Sustainability Report* sebagai pengaplikasian dari konsep *Triple Bottom Line*.

2.1.1.2 Pengertian *Sustainability Report*

Menurut Fauzan (2012) *sustainability report* berarti laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan, tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). *Sustainability report* adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap para *stakeholder* (GRI,2006: 3). Menurut Daly dalam Suryono (2011) *sustainability* merupakan suatu keadaan yang dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Menurut Effendi (2009:109), laporan keberlanjutan adalah:

“Laporan keberlanjutan (*sustainable report*) yaitu suatu laporan yang bersifat nonfinansial yang dapat dipakai sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan”. Dari pernyataan ini diusulkan tiga kaidah operasional dalam mendefinisikan keadaan dari *sustainability*:

1. “Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti ikan, tanah, dan air harus digunakan tidak lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan sumber daya alam tersebut untuk diperbarui kembali.
2. Sumber daya alam yang tidak diperbarui seperti bahan bakar dari fosil dan mineral harus digunakan tidak lebih cepat dari kemampuan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk menggantikannya.
3. Polusi dan sampah harus dikeluarkan tidak lebih cepat daripada kemampuan alam untuk menyerapnya, mendaur ulangnya, atau bahkan memusnahkannya.”

Global reporting Initiative (GRI) merupakan salah satu organisasi internasional yang berpusat di Amsterdam Belanda. Aktivitas utamanya difokuskan kepada pencapaian transparansi dan pelaporan suatu perusahaan melalui pengembangan standar dan pedoman pengungkapan *sustainability report* (Imam dan Sekar,2014:6). *Sustainability report* yang disusun berdasarkan Kerangka Pelaporan GRI mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam satu periode tertentu. Pelaporan *sustainability report* dibagi menjadi tiga komponen (Alkington(1997) dalam Fauzan, 2012:2) yaitu : Kinerja ekonomi, kinerja sosial dan kinerja lingkungan. GRI (*Global Reporting Initiative*) (2013), *sustainability report* (laporan keberlanjutan) adalah laporan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari.

Wibowo dan Faradiza (2014) menyatakan bahwa pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat memberikan bukti nyata bahwa proses produksi yang dilakukan perusahaan tidak

hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan isu sosial dan lingkungan.

Berdasarkan pengertian di atas penulis memiliki pemahaman bahwa pengungkapan *sustainability report* adalah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi yang memuat informasi keuangan maupun non-keuangan mengenai kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap aktivitas yang dijalankan. Laporan tersebut diterbitkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan dan perusahaan dapat tumbuh secara berkesinambungan.

2.1.1.3 Tujuan dan Manfaat *Sustainability Report*

Menurut Jalal (2010) dalam Idah (2013), *Sustainability Report* memiliki tujuan yaitu : 1. Meningkatkan reputasi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. 2. Menjangkau berbagai pemangku kepentingan, agar mereka bisa mendapatkan informasi yang benar, sehingga perlu disebarluaskan melalui berbagai cara (internet, media cetak, stakeholder convening, dan sebagainya). 3. Membantu perusahaan untuk mengambil keputusan manajemen dalam memperbaiki kinerja pada indikator yang masih lemah. 4. Membantu investor untuk mengetahui kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh.

Selain itu manfaat *triple bottom line* dalam *sustainability report* menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Dian (2015) yaitu : 1. Memberikan informasi kepada stakeholders (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) sehingga meningkatkan prospek perusahaan dan membantu mewujudkan transparansi. 2. Membantu membangun reputasi

sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan brand value, market share, dan customer loyalty jangka panjang. 3. Menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya. 4. Digunakan sebagai stimulasi leadership thinking dan performance yang didukung dengan semangat kompetisi. 5. Mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial. 6. Mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang. 7. Membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

2.1.1.4 Pengungkapan *Sustainability Report*

Pengungkapan informasi sosial perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan *sustainability report*. Dimana masih belum ada peraturan yang mewajibkan pengungkapan *sustainability report* di Indonesia. Hal ini jelas berbeda dengan negara-negara di Eropa, dimana praktik pengungkapan *sustainability report* telah diwajibkan untuk semua sektor perusahaan. Sebagaimana tertulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 (revisi 1998) paragraf kesembilan:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna yang memegang peranan penting.”

Berdasarkan PSAK No.1 (revisi 1998) tersebut, maka perusahaan diharapkan untuk dapat mengungkapkan segala informasi yang berkaitan dengan tindakan sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut diperkuat dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan yang dimaksud termuat dalam pasal 74 (1) yang berbunyi: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Dalam kaitannya dengan *sustainability development*, tidak hanya ada isu tunggal saja yang terdapat di dalamnya melainkan isu ekonomi, isu sosial serta isu lingkungan.

Sebagian besar bentuk pengungkapan *sustainability report* perusahaan diungkapkan melalui website perusahaan, dengan media ini siapa saja dapat mengakses sehingga mereka mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab yang telah dilakukan perusahaan. Berdasarkan pengamatan *sustainability report* mengandung *narrative text*, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai pelaksanaan sustainability perusahaan.

Sustainability reporting dapat didesain oleh manajemen sebagai cerita retorik untuk membentuk image (pencitraan) pemakainya melalui pemakaian *narrative text*. Menurut Sari (2013), untuk mendukung adanya pembangunan berkelanjutan, *sustainability report* digunakan sebagai salah satu media informasi perusahaan kepada stakeholder internal maupun eksternal untuk menilai apakah manajemen suatu perusahaan menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya (Lako, 2011:5).

2.1.1.5 Prinsip-prinsip *Sustainability Report*

Sustainability report sebagai pelengkap laporan keuangan perusahaan sangatlah penting bagi para *stakeholder* maupun perusahaan itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip menurut GRI (2006) adalah sebagai berikut:

- “1. Keseimbangan
Sustainability report sebaiknya mengungkapkan aspek positif dan negatif dari kinerja perusahaan untuk dapat memungkinkan penilaian yang masuk akal terhadap keseluruhan kinerja.
2. Dapat Diperbandingkan
Sustainability report berisi isu-isu dan informasi yang ada sebaiknya dipilih, dikumpulkan, dan dilaporkan secara konsisten. Informasi tersebut harus disajikan dengan seksama sehingga memungkinkan para *stakeholder* untuk menganalisis perubahan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu.
3. Kecermatan
Informasi yang dilaporkan dalam *sustainability report* harus cukup akurat dan rinci sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan.
4. Ketepatan Waktu
Pelaporan *sustainability report* tersebut harus terjadwal serta informasi yang ada harus selalu tersedia bagi para *stakeholder* ketika dibutuhkan dalam mengambil kebijakan.
5. Kesesuaian
Informasi yang diberikan dalam *sustainability report* harus sesuai dengan pedoman dan dapat dimengerti serta dapat diakses oleh *stakeholder*. *Stakeholder* harus dapat menemukan informasi yang diperlukan dengan mudah.
6. Dapat Dipertanggungjawabkan
Informasi dan proses yang digunakan dalam penyusunan laporan harus dikumpulkan, direkam, dikompilasi, dianalisis, dan diungkapkan dengan tepat sehingga dapat menetapkan kualitas dan materialitas informasi dari *sustainability report*.”

2.1.1.6 Indikator *Sustainability Report*

Pengungkapan *Sustainability Report* merupakan laporan aktivitas tanggungjawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan yang dipertanggungjawabkan

direksi di depan sidan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan ini berisi laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang telah dilaksanakan selama tahun buku terakhir (hadi, 2011:206).

Indikator pengungkapan *Sustainability Reporting* yang berkembang di Indonesia merujuk pada standar yang diterapkan GRI (*Global Reporting Initiative*). Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan sebagai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan *Sustainability Reporting*.

Saat ini standar GRI versi terbaru, yaitu G4 telah banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia. GRI-G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Fitur yang ada di GRI-G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan sektor apapun dan didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya.

GRI-G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda, baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu atau pelaporan *online*. Dalam standar GRI-G4, indikator kinerja dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Kategori sosial mencakup hak asasi manusia, praktek

ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk dan masyarakat.

Total indikator yang terdapat dalam GRI mencapai 91 item.

Dalam melakukan penilaian pengungkapan *Triple Bottom Line Reporting*, item-item yang akan diberikan skor mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebutkan GRI-G4 *guideline*. Penjelasan mengenai indikator GRI-G4 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator *Triple Bottom Line Reporting*

Kategori Ekonomi		
- Kinerja ekonomi	EC 1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	EC 2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim.
	EC 3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
	EC 4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
- Keberadaan Pasar	EC 5	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>Entry Level</i>) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan.
	EC 6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di operasi yang signifikan
- Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC 7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan.
	EC 8	Dampak Ekonomi tidak langsung yang signifikan termasuk besarnya dampak.
-Praktik Pengadaan	EC 9	Perbandingan dari pemasok lokal di operasional yang signifikan.
Kategori Lingkungan		
- Bahan	EN 1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat dan volume.
	EN 2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang.
- Energi	EN 3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN 4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN 5	Intensitas energi
	EN 6	Pengurangan konsumsi energi.
- Air	EN 7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN 8	Total pengambilan air berdasarkan sumber.
	EN 9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air.
	EN 10	Persentase dan total volume air yang di daur ulang dan digunakan kembali.
- Keanekaragaman Hayati	EN 11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewam dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.

	EN 12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk dan jasa terhadap keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dikawasan lindung.
	EN 13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan.
	EN 14	Jumlah total spesies dalam IUCN RED LIST dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat ditempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan.
- Emisi	EN 15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1).
	EN 16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2).
	EN 17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 2).
	EN 18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN 19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN 20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN 21	NO ₂ , SO ₂ dan emisi udara signifikan lainnya.
- Efluen dan Limbah	EN 22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.
	EN 23	Bobot total berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
	EN 24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan.
	EN 25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan Basel 2 Lampiran I, II, III dan VIII yang diangkut diimpor, diekspor atau diolah dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional.
	EN 26	Identitas, ukuran dan status lindung dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi.
- Produk dan Jasa	EN 27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa.
	EN 28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori.
- Kepatuhan	EN 29	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan.
- Transportasi	EN 30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja.
- Lain-lain	EN 31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis.
- Asesmen Pemasok atas	EN 32	Persentase pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan.
Lingkungan	EN 33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasikan dan tindakan yang diambil.

- Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN 34	Jumlah pengaduan tentang dampang lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
Kategori Sosial		
Sub Kategori : Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja		
- Kepegawaian	LA 1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan <i>turnover</i> karyawan menurut kelompok umur, gender dan wilayah.
	LA 2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
	LA 3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat resistensi setekah cuti melahirkan, menurut gender.
- Hubungan Industrial	LA 4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama.
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA 5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja.
	LA 6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender.
	LA 7	Pekerjaan yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka.
	LA 8	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian formal serikat pekerja.
- Pelatihan dan Pendidikan	LA 9	Jam pelatihan rata-rata pertahun perkaryawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan.
	LA 10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membanting mengelola purna bakti.
	LA 11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara regular menurut gender dan kategori karywan.
- Keberagaman dan Kesertaan Peluang	LA 12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan perkategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas dan indikator keberagaman lainnya.
- Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA 13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan.
- Asesmen Pemasok atas Terkait Praktik	LA 14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan praktik ketenagakerjaan.
	LA 15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
Ketenagakerjaan	LA 16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui pengaduan resmi.

Kategori Sosial		
Sub Kategori : Hak Asasi Manusia		
- Investasi	HR 1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia.
	HR 2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan/prosedur HAM terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan operasi.
- Non Diskriminasi	HR 3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil.
- Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR 4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
- Pekerja Anak	HR 5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif.
- Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	HR 6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.
- Praktik Pengamanan	HR 7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi.
- Hak Adat	HR 8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil.
- Asesmen	HR 9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia.
- Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	HR 10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR 11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
- Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR 12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui pengaduan formal.
Kategori Sosial		
Sub Kategori : Masyarakat		
- Masyarakat Lokal	SO 1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, dampak & pengembangan.
	SO 2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal.
- Anti Korupsi	SO 3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi.
	SO 4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi.
	SO 5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
- Kebijakan Publik	SO 6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat.

- Anti Persaingan	SO 7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti trust, serta praktik monopoli dan hasilnya.
- Kepatuhan	SO 8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan.
- Asesmen Pemasok atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO 9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat.
	SO 10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
- Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO 11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
Kategori Sosial		
Sub Kategori : Tanggungjawab atas Produk		
- Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR 1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan.
	PR 2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil.
- Pelabelan Produk dan Jasa	PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti informasi sejenis.
	PR 4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil.
	PR 5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan.
- Komunikasi Pemasaran	PR 6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan.
	PR 7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan promosi dan sponsor menurut jenis hasil.
- Privasi Pelanggan	PR 8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggaran dan hilangnya data pelanggan.
- Kepatuhan	PR 9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

Sustainability report dapat dinilai dari seberapa banyak indikator-indikator yang dapat diungkapkan dalam laporan tersebut. Semakin banyak indikator yang diungkapkan dalam *sustainability report* maka semakin bagus kualitas dari *sustainability report* tersebut. Menurut Cooke (1989) dalam Dian (2015) “tahap pertama adalah pemberian skor pada setiap indikator kinerja yang terdapat pada

sustainability report. Skor 0 diberikan jika indikator kinerja tidak diungkapkan dan skor 1 diberikan jika indikator kinerja diungkapkan. Selanjutnya, skor dari setiap item tersebut dijumlahkan untuk memperoleh total skor.” Berdasarkan uraian atas rumus perhitungan pengungkapan *Sustainability Report* adalah sebagai berikut :

$$SDI = \frac{TSD}{MSD}$$

Keterangan:

SDI = *Sustainability Disclosure Index*

TSD = Total *Sustainability Disclosure* (Jumlah item yang diungkapkan dalam *sustainability report*)

MSD = *Maximum Sustainability Disclosure* (Jumlah indikator yang terdaftar dalam GRI yaitu 91 item)

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas

Pada umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Para manajemen perusahaan dituntut harus mampu mencapai target yang telah direncanakan. Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2013:196). Rasio ini mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Fahmi, 2015:135).

Menurut Sartono (2010:122) definisi rasio profitabilitas yaitu :

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis memiliki pemahaman bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, aktiva, maupun investasi.

2.1.2.2 Tujuan dan manfaat Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak internal, tetapi juga bagi pihak eksternal atau diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio ini menurut Kasmir (2013:197) yaitu :

- “1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan modal sendiri. “

Sementara itu manfaat yang diperoleh dari penggunaan rasio profitabilitas

menurut Kasmir (2013:198) yaitu

- “1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjam maupun modal sendiri.”

2.1.2.3 Pengukuran Profitabilitas

Menurut Fahmi (2015:135) secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, diantaranya :

“1. *Gross Profit Margin*

Rasio ini mengukur presentase dari laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin baik gross profit margin, maka semakin baik operasional perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa *gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka gross profit margin akan menurun, begitu pula sebaliknya. *Gross profit margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus : } \textit{Gross Profit Margin} = \frac{\textit{Net Sales} - \textit{Cost of Good Sold}}{\textit{Sales}}$$

2. *Net Profit Margin*

Rasio ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu penjualan yang sudah dikurangi dengan seluruh beban termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. *Net profit margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } \textit{Net Profit Margin} = \frac{\textit{Earning After Tax (EAT)}}{\textit{Sales}}$$

3. *Return on Equity (ROE)*

Rasio ini mengukur sejauhmana kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, artinya rasio ini mengukur tingkat keuntungan dari tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } \textit{ROE} = \frac{\textit{Earning After Tax (EAT)}}{\textit{Shareholder's Equity}}$$

4. *Return on Assets (ROA)*

Dibeberapa referensi lainnya rasio ini disebut dengan rasio *return on investment (ROI)*. Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Rasio ini dipergunakan untuk suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : ROA} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan pengukuran ROA (*return on assets*). Pengukuran ROA (*return on assets*) dapat menggambarkan tingkat pengembalian (*return*) atas investasi yang ditanamkan oleh investor dari pengelolaan seluruh aktiva yang digunakan oleh manajemen suatu perusahaan.

2.1.2.4 Pengertian Return On Assets (ROA)

Return On Assets merupakan rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Rasio ini dipergunakan untuk suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Return on assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atas suatu ukuran tentang aktivitas manajemen (Kasmir, 2013:201).

Menurut Fahmi (2015:137) *return on assets* (ROA), yaitu :

“*Return on investmen* (ROI) atau pengambilan investasi, bahwa di beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan *return on assets* (ROA), memiliki arti bahwa rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.”

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat penulis memiliki pemahaman bahwa *return on assets* (ROA) adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan atas aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

2.1.3 Likuiditas

2.1.3.1 Pengertian Likuiditas

Posisi likuiditas berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya yang jatuh tempo dalam jangka pendek, dan kemungkinan perusahaan memiliki masalah dalam memenuhi kewajiban ini.

Menurut Sartono (2010:116) rasio likuiditas adalah :

“Rasio likuiditas, menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan”

Menurut Fahmi (2015:121) rasio likuiditas adalah :

“Rasio likuiditas (*liquidity ratios*) adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan.”

Definisi likuiditas menurut Kasmir (2013:129) adalah

“Likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.”

Dari definisi-definisi di atas penulis memiliki pemahaman bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban finansial jangka pendeknya secara tepat waktu pada saat jatuh tempo. Likuiditas sering digunakan oleh perusahaan maupun investor untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Kewajiban jangka pendek itu seperti, membayar tagihan listrik, gaji pegawai, atau hutang yang telah jatuh tempo. Tetapi terkadang ada

beberapa perusahaan tidak sanggup membayar hutang tersebut pada waktu yang telah ditentukan, dengan alasan perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk menutupi hutang yang telah jatuh tempo tersebut.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan guna menilai kemampuan perusahaan. Selain itu adapula tujuan dari perhitungan rasio likuiditas. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas menurut Kasmir (2013:132) yaitu :

- “1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membawayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

2.1.3.3 Pengukuran Likuiditas

Menurut Fahmi (2015:121) terdapat jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan, yaitu :

“1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek. Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. *Current ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } \textit{Current Ratio} = \frac{\textit{Current Assets}}{\textit{Current Liabilities}}$$

2. Rasio Cepat (*quick ratio* atau *acid-test ratio*)

Rasio cepat (*quick ratio*) atau rasio sangat lancar (*acid test ratio*) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (inventory). Artinya, nilai sediaan kita abaikan, karena persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang likuid disbanding dengan yang lain dan dianggap memerlukan waktu relative lebih lama untuk diungkapkan.

Quick ratio ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } \textit{Quick Ratio} = \frac{\textit{Current assets} - \textit{inventory}}{\textit{Current liabilities}}$$

3. Rasio Kas (*cash ratio*)

Rasio kas (*cash ratio*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas. *Cash ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } \textit{Cash Ratio} = \frac{\textit{Cash or Cash equivalent}}{\textit{Current liabilities}}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengukuran CR (*Current Ratio*). Pengukuran CR (*Current Ratio*) ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya yang segera jatuh tempo selain itu pada saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan maka hal yang harus diatasi dengan ketentuan semua asset perusahaan, adapun secara

luas *current ratio* merupakan ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur : 1. Kemampuan memenuhi kewajiban lancar. Semakin tinggi jumlah (kelipatan) asset lancar terhadap kewajiban lancar, maka semakin rendah keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar. 2. Penyangga kerugian. Semakin besar penyangga, maka semakin kecil resikonya. Rasio lancar menunjukkan tingkat keamanan yang tersedia untuk menutup penurunan nilai asset lancar non-kas pada saat asset tersebut dilepas atau dilikuidasi. 3. Cadangan dana lancar. Rasio lancar merupakan ukuran tingkat keamanan terhadap ketidak pastian dan kejutan seperti pemogokan dan kerugian luar biasa, dapat membahayakan arus kas secara sementara dan tidak terduga.

2.1.3.4 Pengertian *Current Ratio* (CR)

Current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktiva lancar dan dibandingkan dengan utang lancar. Dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Rasio lancar (*current ratio*) adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo (Fahmi, 2015:121)

Pengertian *Current Ratio* (CR) menurut Agus Sartono (2010:116) yaitu :

“Rasio yang menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan.”

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis memiliki pemahaman bahwa *current ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukan

kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancarnya. Kasmir (2014:135) menyatakan Semakin tinggi current ratio perusahaan juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya terutama modal kerja. Modal kerja tersebut berperan dalam menjaga performance kinerja perusahaan

2.1.4 Leverage

2.1.4.1 Pengertian Leverage

Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi biaya yang diperlukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan, maka diperlukan perhitungan rasio leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2013:151).

Menurut Munawir (2010:70) definisi rasio leverage adalah :

“Rasio leverage atau disebut dengan rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini juga menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (kreditur).”

Menurut Fahmi (2015:127), rasio leverage adalah :

“Rasio leverage adalah mengukur seberapa perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban

utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.”

Dari definisi-definisi di atas penulis memiliki pemahaman bahwa rasio leverage ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan utang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk kedalam *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu perusahaan sebaiknya harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untuk membayar

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Menurut Penggunaan rasio leverage yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage menurut Kasmir (2013:153), yaitu :

- “1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menialai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.”

Sementara itu, manfaat dari rasio leverage ini menurut Kasmir (2013:154)

yaitu:

- “1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam mematuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.”

2.1.4.3 Pengukuran *Leverage*

Menurut Kasmir (2013:155) dan Fahmi (2015:127), secara umum terdapat

5 (lima) jenis rasio leverage yang sering digunakan oleh perusahaan, diantaranya :

“1. *Debt to Total Assets Ratio (DAR)*

Dimana rasio ini juga disebut sebagai *debt ratio*. *Debt ratio* merupakan rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan dengan cara mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. *Debt ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : Debt Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio ini digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. DER ini ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. *Debt to equity ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : DER} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total equity}}$$

3. *Time Interest Earned Ratio*

Rasio ini juga disebut dengan rasio kelipatan. *Time interest earned ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) karena tidak

mampu membayar bunga. *Time interest earned ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } \textit{Time interest earned ratio} = \frac{\textit{Earning Before Interest and Tax}}{\textit{Interest Expense}}$$

4. *Fixed Charge Coverage Ratio*

Rasio ini disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio ini menyerupai *Time interest earned ratio* hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Rasio *Fixed charge coverage* ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. *Fixed charge coverage* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } \textit{FCC} = \frac{\textit{EBIT} + \textit{Beban bunga} + \textit{kewajiban sewa}}{\textit{Beban bunga} + \textit{Kewajiban sewa}}$$

5. *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Rasio ini merupakan rasio jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan pinjaman utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. *Long-term debt* merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya. LTDtER ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } \textit{LTDtER} = \frac{\textit{Long term debt}}{\textit{Equity}}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Debt To Equity Ratio (DER)*.

Pengukuran *Debt To Equity Ratio ini* menggambarkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. *Debt To Equity Ratio* juga dapat menggambarkan seberapa baik struktur investasi suatu perusahaan.

2.1.4.4 Pengertian *Debt to Equity Ratio (DER)*

Debt to Equity Ratio juga dikenal sebagai Rasio Leverage (rasio pengungkit) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Rasio Hutang terhadap Ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analis dan para investor untuk melihat

seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham (Kasmir, 2013).

Kasmir (2013) pun menyatakan bahwa keuntungan dengan mengetahui rasio ini adalah sebagai berikut:

- “1. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan.”

Debt to Equity Ratio ini merupakan rasio penting untuk diperhatikan pada saat memeriksa kesehatan keuangan perusahaan. Jika rasionya meningkat, ini artinya perusahaan dibiayai oleh kreditor (pemberi hutang) dan bukan dari sumber keuangannya sendiri yang mungkin merupakan trend yang cukup berbahaya. Pemberi pinjaman dan Investor biasanya memilih *Debt to Equity Ratio* yang rendah karena kepentingan mereka lebih terlindungi jika terjadi penurunan bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki *Debt to Equity Ratio* atau Rasio Hutang terhadap Ekuitas yang tinggi mungkin tidak dapat menarik tambahan modal dengan pinjaman dari pihak lain.

2.1.5 Struktur Kepemilikan

2.1.5.1 Pengertian Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme tata kelola yang penting untuk mengendalikan masalah keagenan. Jensen dan Meckling (1976)

dalam Faisal (2005) menyatakan bahwa “Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan.”

Terutama pada lingkungan dimana tata kelola seperti *market of corporate control*, *external auditors*, *rating agencies* dan kerangka kerja institusi (sistem hukum dan lembaga keuangan) yang lemah. Indonesia merupakan Negara dengan sistem hukum yang lemah dan terutama *control of corruption*-nya yang masih rendah. Mengingat kelemahan ini struktur kepemilikan bisa menjadi cara penting untuk mengontrol masalah keagenan melalui pemilihan agen atau dewan perusahaan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan. Struktur dewan perusahaan merupakan hasil dari menyeimbangkan kepentingan dari *stakeholders* yang berbeda termasuk pemilik atau investor.

Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan, manajemen dan struktur dewan. Pemilik yang berbeda mungkin menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dari perilaku dan pilihan untuk tata kelola perusahaan yang cenderung memengaruhi struktur dewan perusahaan (Munisi dkk.,2014).

Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Istilah struktur kepemilikan juga dipakai untuk menunjukan bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang dan ekuitas, tetapi persentase kepemilikan antara manajer dan institusional.

Berdasarkan proporsi saham yang dimiliki, struktur kepemilikan dikelompokkan menjadi Kepemilikan Manajerial (*Manajerial ownership*) dan Kepemilikan Institutional (*Institutional Ownership*).

Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faisal, 2005). Sedangkan pemegang saham institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau di atas 5%. Pemegang saham institusional besar diasumsikan memiliki orientasi investasi jangka panjang. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Faisal, 2005).

Dari pemaparan di atas penulis memiliki pemahaman bahwa struktur kepemilikan adalah suatu mekanisme yang penting dalam mengelola masalah keagenan, struktur kepemilikan dapat mengontrol masalah keagenan melalui pemilihan agen atau dewan perusahaan untuk melakukan pengolahan dan pengawasan yang dapat dikategorikan menjadi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Selain itu struktur kepemilikan berdasarkan proporsi saham yang dimiliki dikelompokkan menjadi kepemilikan manajerial (*Manajerial ownership*) dan kepemilikan institutional (*Institutional Ownership*).

2.1.5.2 Kategori Struktur Kepemilikan

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan, Rustiarini dalam Maya (2013). Menurut Marcus, Kane dan Bodie (2006:8) menyatakan bahwa “Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri.” Sementara Menurut Imanta dan Satwiko (2011) definisi kepemilikan manajerial “Merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.” Kepemilikan manajerial menurut Wahidahwati (2002:5) dalam Rustendi dan Jimmi (2008) adalah “Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki manajer.”

Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajerial yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan.

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan menurut Marcus, Kane dan Bodie (2006:10) menyatakan bahwa “Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing. Kepemilikan institusional dapat mengurangi agency cost dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dengan keterlibatan institusional dalam kepemilikan saham.” Sedangkan menurut Vera Kusumawati (2011), Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Annisa dan Nazar (2015), Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja

manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi kepada stakeholders untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan.

Dari penjelasan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional di atas penulis memiliki pemahaman bahwa kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham dimana manajemen akan aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Dalam kepemilikan institusional dapat mengurangi *agency cost* dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional dengan kata lain kepemilikan institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi kepada stakeholders untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan. Dalam penelitian ini struktur kepemilikan di proksikan pada kepemilikan manajerial, hal ini dikarenakan kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan.

2.1.5.3 Metode Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Pengukuran kepemilikan manajerial adalah jumlah presentase saham yang dimiliki oleh manajemen pada akhir tahun. Sedangkan total saham yang beredar,

dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun (Marcus, Kane dan Bodie, 2006:9).

Berdasarkan uraian di atas, rumus kepemilikan manajerial sebagai berikut :

$$MO = \frac{\text{Kepemilikan Saham Manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100 \%$$

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL
1	Sandra Aulia Z dan TB MH Idris Kartawijaya (Universitas Indonesia) 2011	Analisis Pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i> dan Faktor yang Mempengaruhi ; Lintas Negara Indonesia dan Jepang	Bebas: Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Jenis Industri, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Asing , <i>Corporate Governance</i> dan Negara. Terikat: <i>Triple Bottom Line</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Variabel Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan Jenis Industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i> . Sementara <i>Leverage</i> , Kepemilikan Asing, <i>Corporate Governace</i> dan Negara tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i> .
2	Adhy Karyo Nugroho dan Agus Purwanto (Universitas Diponegoro) 2013	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan	Bebas: <i>Leverage</i> , Jenis Industri, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Institusional,	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Variabel <i>Leverage</i> , Jenis Industri, Ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL
		<i>Triple Bottom Line</i> Di Indonesia	Kepemilikan Manajemen dan Kepemilikan Asing Terikat: <i>Triple Bottom Line</i>	signifikan terhadap pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i> . Sementara Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Instiusional, Kepemilikan Manajemen dan Kepemilkan Asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i> .
3	Fitri Yanti dan Ni Ketut Rasmini (Universitas Udayana) 2015	Analisis Pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i> dan Faktor yang mempengaruhi : Studi Di Perusahaan Indonesia dan Singapura	Bebas: Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Karakteristik Negara, <i>Leverage</i> dan Likuiditas. Terikat: <i>Triple Bottom Line</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Variabel Profitabilitas, Kepemilikan Asing dan Karakteristik Negara berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i> . Sementara <i>Leverage</i> dan Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i> .
4	Fadhila Adhipradana (Universitas Diponogoro) 2014	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report	Bebas: Profitabilitas, Likuiditas, Rasio Pembayaran Dividen, Total Aset, Total Karyawan, Komite Audit, Dewan Komisaris, <i>Governance</i>	Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Total Aset, Total Karyawan dan <i>Governance Committee</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Sustainability</i>

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL
			<i>Committee, Kepemilikan Manajemen dan Kepemilikan Asing Terikat: Pengungkapan Sustainability Report.</i>	<i>Report.</i> Sedangkan variabel Profitabilitas, Likuiditas, Rasio Pembayaran Dividen, Komite Audit, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajemen dan Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Sustainability Report.</i>
5	Muqodim dan Joko Susilo (Universitas Islam Indonesia) 2011	<i>Triple Bottom Line Reporting Dalam Pelaporan Tahunan Perusahaan Go Public Di Indonesia</i>	Bebas: <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Terikat: <i>Triple Bottom Line Reporting GRI Standard</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2010, terdapat 72% perusahaan melaporkan kinerja sosial dan lingkungan, sementara pada tahun 2011, terdapat 77% perusahaan melaporkan informasi tersebut. Namun, dari perspektif standar pelaporan GRI, data menunjukkan bahwa informasi kinerja lingkungan dan sosial belum dilaporkan sepenuhnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah banyak perusahaan yang melaksanakan kegiatan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari adanya aturan yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, serta telah tumbuhnya kesadaran dari para pengusaha tentang pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dapat memperkuat kelangsungan hidup perusahaan, dengan membangun kerja sama di antara stakeholder yang difasilitasi oleh perusahaan melalui penyusunan program-program pengembangan masyarakat di sekitar perusahaan (Sudana, 2011:11).

Faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor eksternal dan internal perusahaan. Faktor internal perusahaan seperti profitabilitas, likuiditas, *leverage*, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, profil perusahaan, ukuran dewan komisaris, status pencatatan, tipe industri, tujuan internal perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan dividen. Faktor eksternal meliputi sistem pasar, sistem politik, sistem pengetahuan, dan sistem sosial. (Lynes & Andrachuck, 2008 dalam Febrina dan IGN Agung Suaryana, 2011)

Transparansi informasi yang diungkap tidak hanya informasi mengenai keuangan perusahaan saja, tetapi juga informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. Dengan adanya masalah sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis perusahaan,

maka sudah selangkahnya apabila entitas bisnis bersedia untuk menyajikan suatu laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi disekitarnya. *Sustainability Report* sebagai sebuah gagasan menjadikan perusahaan untuk tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja, tetapi juga harus berpijak pada *triple bottom line*, yaitu memperlihatkan masalah sosial dan lingkungan.

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Triple Bottom Line*

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang dapat meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan. Sehingga besar kecilnya suatu perusahaan dapat dinilai dari profit yang dihasilkan. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin tinggi pula informasi yang diberikan oleh manajer. Hal ini dikarenakan pihak manajemen ingin meyakinkan investor mengenai profitabilitas dan kompetensi manajer. Pada saat tingkat profitabilitas rendah, para pengguna laporan akan membaca “*good news*” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut (Rudianto, 2013:46).

Hal ini sesuai dengan penelitian Belkaoui dan Karpik (1989) yang menyatakan bahwa profitabilitas mendukung keyakinan kepada perusahaan agar melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial. Pengungkapan tanggungjawab sosial ini diaplikasikan dalam *Sustainability Report*. Pengungkapan *Sustainability Report* dilakukan sebagai media komunikasi dengan para *stakeholder*, yang ingin memperoleh keyakinan tentang bagaimana profit dihasilkan perusahaan.

Informasi ini terutama penting bagi *stakeholder* selain investor dan kreditor yang biasanya dimotivasi oleh kepentingan ekonomi atau finansial.

Oleh karena itu, dengan tingkat profitabilitas yang tinggi perusahaan menyertakan *Sustainability Report* dalam laporannya. Seperti dalam penelitian Sandra Aulia Z dan TB MH Idris Kartawijaya (2011) menyatakan bahwa, entitas dengan kinerja ekonomi yang rendah cenderung tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi karena ingin menunjukkan kepada publik bahwa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain dengan industri yang sama. Karena melalui *sustainability report*, perusahaan dapat menyampaikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan yang berpengaruh terhadap kondisi sosial, masyarakat dan lingkungan.

2.2.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Pengungkapan *Triple Bottom Line*

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar dari hutang lancarnya atau hutang jangka pendek.

Hal ini tentunya menunjukkan kemampuan perusahaan yang kredibel sehingga menciptakan *image* positif dan kuat melekat pada perusahaan. *Image* positif tersebut semakin memungkinkan pihak *stakeholders* untuk selalu ada pada pihak perusahaan atau mendukung perusahaan tersebut (Suryono dan Prastiwi, 2011). Oyelere et al. (2003) dalam Jennifer Ho dan Taylor (2007) mengatakan bahwa likuiditas perusahaan adalah faktor penting bagi pengungkapan yang dilakukan perusahaan, karena investor, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya sangat memperhatikan status *going concern* perusahaan.

Penelitian Sandra Aulia Z dan TB MH Idris Kartawijaya (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang sangat likuid memiliki insentif yang kuat untuk memberikan rincian lebih lanjut dalam pengungkapan perusahaan mereka tentang kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek keuangannya. Sehingga semakin tinggi tingkat likuiditasnya maka semakin luas pula pengungkapan *triple bottom line* perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hussainey, et. al (2011) menemukan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara likuiditas dan pengungkapan tanggungjawab sosial, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan cenderung mengungkapkan tanggungjawab sosial yang makin banyak karena lebih berani mengambil keputusan yang terkategori "*costly decision*".

2.2.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Triple Bottom Line*

Leverage adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. *Leverage* keuangan mengacu pada jumlah pendanaan melalui pinjaman perusahaan dalam struktur modal. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, berarti semakin

tinggi pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Menurut Jensen (2002) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin tinggi risiko perusahaan. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan menanggung biaya pengawasan yang tinggi sehingga akan menyediakan informasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan perusahaan.

Seperti penelitian Sandra (2011) mengatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi beresiko memiliki biaya monitoring yang tinggi pula. Manajemen secara konsisten mengungkapkan untuk tujuan monitoring agar memastikan kepada kreditor kemampuan untuk membayar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya agensi. Sehingga kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan dalam rangka penungkapan *triple bottom line* menjadi sulit. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi cenderung untuk menurunkan pengungkapan *triple bottom line*.

Hal ini sesuai dengan penelitian Adhy Karyo Nugroho dan Agus Purwanto (2013) yang menyatakan bahwa faktor tingkat *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial seperti *sustainability report*.

2.2.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan *Triple Bottom Line*

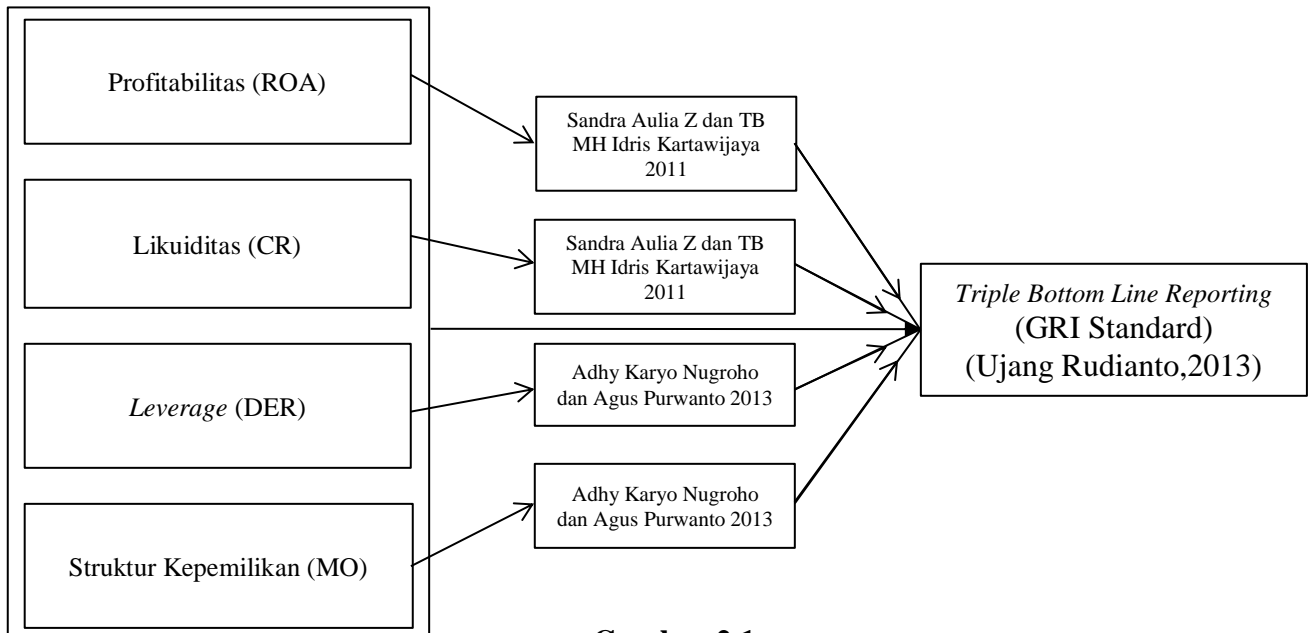
Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme tata kelola yang penting untuk mengendalikan masalah keagenan. Berdasarkan proporsi saham yang dimiliki, struktur kepemilikan dikelompokkan menjadi Kepemilikan Manajerial (*Management ownership*) dan Kepemilikan Institutional (*Institutional*

Ownership). Domash dalam Riha dan Ade (2011) menyatakan kepemilikan manajerial merupakan para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan, yang biasanya dinyatakan sebagai persentase saham perusahaan yang beredar yang dimiliki oleh orang dalam perusahaan yaitu manajer, komisaris dan direksi.

Semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial maka akan semakin mengurangi perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Dengan begitu manajer akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan, yaitu salah satunya dengan mengungkapkan laporan tanggungjawab sosial untuk meningkatkan *image* perusahaan meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktifitas tersebut (Gray, et al. 1988 dalam Anggraini, 2006).

Demsetz dan Jensen (1983) dalam Rawi (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajemen, semakin tinggi pula untuk melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti pada penelitian Adhy Karyo Nugroho dan Agus Purwanto (2013) yang menyatakan kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pengeluaran program tanggungjawab sosial dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Namun pada suatu titik yang mana mengurangi nilai perusahaan dan batasan yang telah dicapai ditemukan hubungan negatif. Bila dihubungkan dengan konsep agensi, maka prinsipal dan agen menjadi satu pihak yang tidak terpisahkan. Sehingga manajemen cenderung berbuat semaunya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka model kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Terdapat pengaruh Profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan *triple bottom line*.
- H₂ : Terdapat pengaruh Likuiditas perusahaan terhadap *pengungkapan triple bottom line*.
- H₃ : Terdapat pengaruh *Leverage* perusahaan terhadap pengungkapan *triple bottom line*.
- H₄ : Terdapat pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap pengungkapan *triple bottom line*.